



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023 KEPADA DESA UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa dari dana Tahun Anggaran 2023 peruntukan DBHPRD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

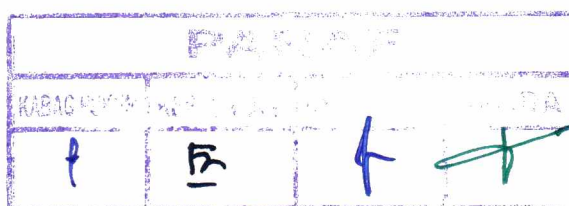
4. Undang-Undang ...

PARAI			
KEMERIS NUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	R	f	t

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023 KEPADA DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024.**



BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang selanjutnya disingkat DPMDSos adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBHPRD adalah bagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten yang diberikan kepada Desa.
15. Nilai Bobot adalah nilai bobot Desa yang ditentukan berdasarkan realisasi pajak dan retribusi per desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD/ASS	...	SEKDA
P	F	f	+

16. Badan Usaha ...

16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Maksud dan tujuan pemberian DBHPRD kepada desa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. RKPDes adalah Rencana Kerja Pemerintah desa.
19. Linmas adalah Perlindungan Masyarakat.

BAB II

PENGALOKASIAN DBHPRD

Bagian Kesatu Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan Dana BHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penyediaan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
 - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa;
 - n. meningkatkan daya saing desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEMAS	KEMASS	SEKDA
P	M	K	T

(3) Pengalokasian ...

- (3) Pengalokasian Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
- setiap desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Barito Timur;
 - meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - meningkatkan pembinaan masyarakat desa;
 - meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan DBHPRD

Pasal 3

- Dana BHPRD dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pengelolaan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPRD

Pasal 4

- Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPRD kepada desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- Besaran pengalokasian DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari desa masing- masing.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembagian

Pasal 5

Tata cara pembagian alokasi DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BPP	ASS	SEKDA
f	15	f	[Signature]

- realisasi ...

- b. realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan 10% (sepuluh persen);
- c. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan 60% (enam puluh persen); dan
- d. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi rata kepada seluruh desa.

Pasal 6

Tata cara pembagian alokasi DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;
- b. realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan 10% (sepuluh persen);
- c. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan 40% (empat puluh persen); dan
- d. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi secara proporsional dengan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah per desa dibagi jumlah realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah seluruh Desa berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 7

Besaran alokasi DBHPRD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.074.986.644,- (lima milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Pengelolaan bagian Desa dari DBHPRD merupakan tanggung jawab Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Keuangan Desa.

Pasal 9

DBHPRD kepada Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber Pendapatan Desa yang diperuntukkan untuk Belanja Desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

PARAF			
KABAG. HUKUM	K. A. OPO	ASS. ...	SEKDA
			

BAB IV ...

BAB IV
PENYALURAN PENCAIRAN
DANA BHPRD

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebesar 100% (seratus persen)
- (2) Penyaluran Dana BHPRD dari RKD ke rekening BUMDesa sebesar 50% (lima puluh persen) bagi desa;
- (3) Penyaluran Dana BHPRD 50% (lima puluh persen) dialokasikan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (4) Penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.
- (5) Penyaluran DBHPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) wajib berpedoman dari hasil musyawarah yang tertuang dalam RKPDes.

BAB V
PENGGUNAAN DBHPRD

Pasal 11

- (1) DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk penyertaan modal BUMDesa dan peningkatan sarana prasarana desa.
- (3) Alokasi penyertaan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Penyaluran DBHPRD bagi penyertaan modal desa untuk BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana BHPRD.
- (5) Penyaluran 50 % (lima puluh persen) Dana BHPRD sebagaimana dimaksud untuk peningkatan sarana prasarana desa dengan memperhatikan pada pasal 2 ayat (2) dengan ketentuan dari hasil musyawarah desa yang tertuang dalam RKPDes.

BAB VI
PELAPORAN DANA BHPRD

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DESA	KAS	SEKDA
P	F	F	F

(2) Laporan ...

- (2) Laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD sampai dengan tahap I;
 - laporan realisasi penyerapan Dana BHPRD tahunan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- Pemerintah Desa mengkoordinasikan pelaksanaan Dana BHPRD kepada Desa.
- Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengelolaan Dana BHPRD kepada Desa.
- Untuk melaksanakan pembinaan pengelola Dana BHPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :

- memfasilitasi administrasi keuangan Dana BHPRD kepada Desa;
- memfasilitasi pengelolaan keuangan Dana BHPRD kepada Desa;
- memfasilitasi penyelenggaraan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Dana BHPRD kepada Desa.

Pasal 15

Pembinaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi :

- memberikan pedoman teknis pengelola Dana BHPRD kepada Desa;
- memberi bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Dana BHPRD kepada Desa;
- membina dan mengawasi pengelolaan Dana BHPRD Kepada Desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Kurang salur/lebih salur DBHPRD akan diperhitungkan pada tahun berikutnya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. A. OPD	ASS. ...	SEKDA
P	15	f	A

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Januari 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 181

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	B	f	T

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
2023 KEPADA DESA UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2024

LEMBAR PERHITUNGAN PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023 KEPADA DESA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Desa	Tahun 2024					Total DBHPRD Per Desa
		Alokasi Dasar 60%	Alokasi Formula (40%)			Alokasi Formula Per Desa	
			Realisasi Pajak dan Retribusi Per Desa	Realisasi Pajak dan Retribusi 101 Desa	Bobot		
1	2	3	4	5	6=4/5	7	8=3+7
I KECAMATAN DUSUN TIMUR							
1	PULAU PATAI	30,449,921	2,211,111	442,273,874	0.00524	10,629,461	41,079,382
2	SARAPAT	30,449,921	7,122,381	442,273,874	0.01687	34,239,379	64,689,300
3	MAGANTIS	30,449,921	6,991,580	442,273,874	0.01656	33,610,581	64,060,502
4	JA'AR	30,449,921	14,146,359	442,273,874	0.03350	68,005,707	98,455,628
5	MATABU	30,449,921	17,508,337	442,273,874	0.04146	84,167,723	114,617,644
6	DORONG	30,449,921	6,185,972	442,273,874	0.01465	29,737,786	60,187,707
7	DIDI	30,449,921	6,192,866	442,273,874	0.01467	29,770,928	60,220,849
8	KARANG LANGIT	30,449,921	7,154,512	442,273,874	0.01694	34,393,843	64,843,764
9	HARINGEN	30,449,921	3,738,535	442,273,874	0.00885	17,972,237	48,422,158
10	JAWETEN	30,449,921	45,285,310	442,273,874	0.10724	217,699,799	248,149,720
11	MATARAH	30,449,921	3,409,806	442,273,874	0.00807	16,391,940	46,841,861
12	MARAGUT	30,449,921	1,758,699	442,273,874	0.00416	8,454,583	38,904,504
13	MANGKARAP	30,449,921	3,357,316	442,273,874	0.00795	16,139,605	46,589,526
14	GUMPA	30,449,921	282,338	442,273,874	0.00067	1,357,282	31,807,203
15	SUMUR	30,449,921	6,750,971	442,273,874	0.01599	32,453,902	62,903,823
16	HARARA	30,449,921	194,731	442,273,874	0.00046	936,129	31,386,050
	Total	487,198,736	132,290,824		0.04317	635,960,883	1,123,159,619
II KECAMATAN BENUA LIMA							
1	KANDRIS	30,449,921	148,685	442,273,874	0.00035	714,773	31,164,580
2	BANYU LANDAS	30,449,921	1,085,741	442,273,874	0.00257	5,219,476	35,669,397
3	BAGOK	30,449,921	7,050,480	442,273,874	0.01670	33,893,730	64,343,651
4	BAMBAN	30,449,921	3,157,666	442,273,874	0.00748	15,179,829	45,629,750
5	TEWAH PUPUH	30,449,921	5,732,490	442,273,874	0.01358	27,557,765	58,007,686
6	GUDANG SENG	30,449,921	1,305,888	442,273,874	0.00309	6,277,788	36,727,709
	Total	182,699,526	18,480,950		0.04377	88,843,360	271,542,772
III KECAMATAN PATANGKEP TUTUI							
1	PULAU PADANG	30,449,921	1,614,215	442,273,874	0.00382	7,760,006	38,209,927
2	KAMBITIN	30,449,921	2,292,747	442,273,874	0.00543	11,021,909	41,471,830
3	RAMANIA	30,449,921	2,283,850	442,273,874	0.00541	10,979,138	41,429,059
4	BENTOT	30,449,921	3,258,846	442,273,874	0.00772	15,666,231	46,116,152
5	AMPARI BURA	30,449,921	336,914	442,273,874	0.00080	1,619,645	32,069,566
6	KOTAM	30,449,921	5,868,396	442,273,874	0.01390	28,211,105	58,661,026
7	BETANG NALONG	30,449,921	829,336	442,273,874	0.00196	3,986,862	34,436,783
8	MAWANI	30,449,921	3,092,986	442,273,874	0.00732	14,868,893	45,318,814
9	JANGO	30,449,921	1,612,820	442,273,874	0.00382	7,753,300	38,203,221
10	LALAP	30,449,921	2,076,957	442,273,874	0.00492	9,984,543	40,434,464
	Total	304,499,210	23,267,067		0.05510	111,851,631	416,350,841
IV KECAMATAN AWANG							
1	JANAH JARI	30,449,921	2,096,242	442,273,874	0.00496	10,077,252	40,527,173
2	BANGKIRAYEN	30,449,921	4,385,510	442,273,874	0.01039	21,082,436	51,532,357
3	HAYAPING	30,449,921	1,825,309	442,273,874	0.00432	8,774,797	39,224,718
4	TANGKAN	30,449,921	2,635,980	442,273,874	0.00624	12,671,931	43,121,852
5	WUNGKUR NANAKAN	30,449,921	2,327,341	442,273,874	0.00551	11,188,212	41,638,133
6	AMPARI	30,449,921	2,220,841	442,273,874	0.00526	10,676,236	41,126,157
7	APAR BATU	30,449,921	4,004,495	442,273,874	0.00948	19,250,785	49,700,706
8	BIWAN	30,449,921	1,437,147	442,273,874	0.00340	6,908,788	37,358,709
9	JANAH MANSIWUI	30,449,921	619,484	442,273,874	0.00147	2,978,042	33,427,963
10	DANAU	30,449,921	760,518	442,273,874	0.00180	3,656,034	34,105,955
11	PIANGGU	30,449,921	3,264,165	442,273,874	0.00773	15,691,801	46,141,722
	Total	334,949,131	25,577,032		0.06057	122,956,312	457,905,443
V KECAMATAN DUSUN TENGAH							
1	SAING	30,449,921	6,039,259	442,273,874	0.01430	29,032,494	59,482,415
2	RODOK	30,449,921	9,416,984	442,273,874	0.02230	45,270,211	75,720,132
3	AMPAH II	30,449,921	124,892	442,273,874	0.00030	600,393	31,050,314
4	PUTAI	30,449,921	1,869,772	442,273,874	0.00443	8,988,544	39,438,465
5	NETAMPIN	30,449,921	4,498,968	442,273,874	0.01065	21,627,862	52,077,783
6	SUMBER GARUNGGUNG	30,449,921	3,121,078	442,273,874	0.00739	15,003,940	45,453,861
7	MUARA AWANG	30,449,921	844,380	442,273,874	0.00200	4,059,183	34,509,104
	Total	213,149,447	25,915,333		0.06137	124,582,625	337,732,072
VI PEMATANG KARAU							
1	MUARA PLANTAU	30,449,921	1,982,771	442,273,874	0.00470	9,531,763	39,981,684
2	KETAB	30,449,921	858,437	442,273,874	0.00203	4,126,759	34,576,680
3	KUPANG BERSIH	30,449,921	980,690	442,273,874	0.00232	4,714,465	35,164,386
4	TUYAU	30,449,921	1,148,185	442,273,874	0.00272	5,519,663	35,969,584
5	PINANG TUNGGAL	30,449,921	1,908,185	442,273,874	0.00452	9,173,206	39,623,127
6	NAGALEAH	30,449,921	3,488,393	442,273,874	0.00826	16,769,731	47,219,652
7	LAMPEONG	30,449,921	2,547,732	442,273,874	0.00603	12,247,697	42,697,618
8	BARARAWA	30,449,921	2,211,442	442,273,874	0.00524	10,631,052	41,080,973
9	BAMBULUNG	30,449,921	13,896,496	442,273,874	0.03291	66,804,542	97,254,463
10	LEBO	30,449,921	232,649	442,273,874	0.00055	1,118,412	31,568,333
11	MURU DUYUNG	30,449,921	1,588,399	442,273,874	0.00376	7,635,901	38,085,822
12	TUMPUNG ULUNG	30,449,921	2,091,436	442,273,874	0.00495	10,054,148	40,504,069
13	SUMBER REJO	30,449,921	13,911,312	442,273,874	0.03294	66,875,767	97,325,688
	Total	395,848,973	46,846,127		0.11094	225,203,105	621,052,078

PARAF

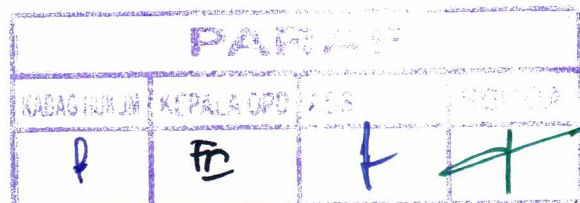
KECAMATAN	KEPALA OPD/ASS	SEKDA	
f	B	f	A

No	Nama Desa	Tahun 2024					Total DBHPRD Per Desa
		Alokasi Dasar 60%	Alokasi Formula (40%)				
			Realisasi Pajak dan Retribusi Per Desa	Realisasi Pajak dan Retribusi 101 Desa	Bobot	Alokasi Formula Per Desa	
1	2	3	4	5	6=4/5	7	8=3+7
VII KECAMATAN PAJU EPAT							
1	JURU BANU	30.449.921	12.000	442.273.874	0,00003	57.688	30.507.609
2	TELANG BARU	30.449.921	17.777.458	442.273.874	0,04210	85.461.467	115.911.388
3	TAMPU LANGIT	30.449.921	1.788.503	442.273.874	0,00424	8.597.860	39.047.781
4	TELANG	30.449.921	2.580.438	442.273.874	0,00611	12.404.924	42.854.845
5	MAIPE	30.449.921	1.405.985	442.273.874	0,00333	6.758.983	37.208.904
6	MURUTUWU	30.449.921	4.025.025	442.273.874	0,00953	19.349.479	49.799.400
7	BALAWA	30.449.921	4.406.191	442.273.874	0,01043	21.181.856	51.631.777
8	KALINAPU	30.449.921	-	442.273.874	-	-	30.449.921
9	SIONG	30.449.921	12.761.050	442.273.874	0,03022	61.346.119	91.796.040
Total		274.049.289	44.756.650		0,10599	215.158.375	489.207.664
VIII KECAMATAN RAREN BATUAH							
1	PURI	30.449.921	1.254.202	442.273.874	0,00297	6.029.318	36.479.239
2	LENGGANG	30.449.921	3.557.309	442.273.874	0,00842	17.101.030	47.550.951
3	BATUAH	30.449.921	3.790.071	442.273.874	0,00898	18.219.986	48.669.907
4	UNSUM	30.449.921	1.590.549	442.273.874	0,00377	7.646.237	38.096.158
5	BARUYAN	30.449.921	2.822.745	442.273.874	0,00668	13.569.765	44.019.686
6	TURAN AMIS	30.449.921	3.707.410	442.273.874	0,00878	17.822.610	48.272.531
7	MALINTUT	30.449.921	608.526	442.273.874	0,00144	2.925.363	33.375.284
8	TANGKUM	30.449.921	7.230.574	442.273.874	0,01712	34.759.495	65.209.416
9	SIBUNG	30.449.921	4.269.232	442.273.874	0,01011	20.523.453	50.973.374
Total		274.049.289	28.830.618		0,06827	138.597.257	412.646.546
IX KECAMATAN PAKU							
1	TAMPA	30.449.921	6.410.269	442.273.874	0,01518	30.816.048	61.265.969
2	KALAMUS	30.449.921	4.084.790	442.273.874	0,00967	19.636.786	50.086.707
3	SIMPANG BANGKUANG	30.449.921	7.718.496	442.273.874	0,01828	37.105.079	67.555.000
4	PATUNG	30.449.921	7.384.070	442.273.874	0,01749	35.497.395	65.947.316
5	RUNGGU RAYA	30.449.921	12.433.982	442.273.874	0,02945	59.773.807	90.223.728
6	BANTAI NAPU	30.449.921	2.861.628	442.273.874	0,00678	13.756.687	44.206.608
7	TARINSING	30.449.921	638.440	442.273.874	0,00151	3.069.169	33.519.090
8	PAKU BETO	30.449.921	755.333	442.273.874	0,00179	3.631.108	34.081.029
9	GANDRUNG	30.449.921	1.026.867	442.273.874	0,00243	4.936.452	35.386.373
10	PANGKAN	30.449.921	370.248	442.273.874	0,00088	1.779.891	32.229.812
11	KUPANG BARU	30.449.921	618.370	442.273.874	0,00146	2.972.686	33.422.607
12	LUAU JAWUK	30.449.921	7.177.154	442.273.874	0,01700	34.502.689	64.952.610
Total		365.399.052	51.479.647		0,12191	247.477.798	612.876.850
X KECAMATAN KARUSEN JANANG							
1	DAYU	30.449.921	5.378.648	442.273.874	0,01274	25.856.742	56.306.663
2	WURAN	30.449.921	3.050.080	442.273.874	0,00722	14.662.631	45.112.552
3	IPU MEA	30.449.921	4.531.526	442.273.874	0,01073	21.784.378	52.234.299
4	LAGAN	30.449.921	5.525.146	442.273.874	0,01308	26.561.001	57.010.922
5	PUTUT TAWULUH	30.449.921	717.108	442.273.874	0,00170	3.447.349	33.897.270
6	SIMPANG NANENG	30.449.921	3.899.807	442.273.874	0,00924	18.747.519	49.197.440
7	KANDRIS	30.449.921	1.727.311	442.273.874	0,00409	8.303.692	38.753.613
Total		213.149.447	24.829.626		0,05880	119.363.312	332.512.759
Jumlah Keseluruhan		3.044.991.986	422.273.874			2.029.994.658	5.074.986.644

Kontrol Penghitungan	
Pagu DBHPRD Kabupaten Barito Timur	5.074.986.644
Pagu Alokasi Dasar (60%)	3.044.991.986
Pagu Bagian Formula (40%)	2.029.994.658
Jumlah Desa	100

Pj. Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023 KEPADA DESA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

PEMBAGIAN PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN 2023 KEPADA DESA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Desa	Total DBHPRD Per Desa	Pembagian Per Tahapan	
			Tahap I	Tahap II
I	KECAMATAN DUSUN TIMUR			
1	PULAU PATAI	41,079,382	20,539,691	20,539,691
2	SARAPAT	64,689,300	32,344,650	32,344,650
3	MAGANTIS	64,060,502	32,030,251	32,030,251
4	JA'AR	98,455,628	49,227,814	49,227,814
5	MATABU	114,617,644	57,308,822	57,308,822
6	DORONG	60,187,707	30,093,854	30,093,854
7	DIDI	60,220,849	30,110,424	30,110,424
8	KARANG LANGIT	64,843,764	32,421,882	32,421,882
9	HARINGEN	48,422,158	24,211,079	24,211,079
10	JAWETEN	248,149,720	124,074,860	124,074,860
11	MATARAH	46,841,861	23,420,930	23,420,930
12	MARAGUT	38,904,504	19,452,252	19,452,252
13	MANGKARAP	46,589,526	23,294,763	23,294,763
14	GUMPA	31,807,203	15,903,601	15,903,601
15	SUMUR	62,903,823	31,451,912	31,451,912
16	HARARA	31,386,050	15,693,025	15,693,025
	Total	1,123,159,619	561,579,810	561,579,810
II	KECAMATAN BENUA LIMA			
1	KANDRIS	31,164,580	15,582,290	15,582,290
2	BANYU LANDAS	35,669,397	17,834,699	17,834,699
3	BAGOK	64,343,651	32,171,826	32,171,826
4	BAMBAN	45,629,750	22,814,875	22,814,875
5	TEWAH PUPUH	58,007,686	29,003,843	29,003,843
6	GUDANG SENG	36,727,709	18,363,854	18,363,854
	Total	271,542,772	135,771,386	135,771,386
III	KECAMATAN PATANGKEP TUTUI			
1	PULAU PADANG	38,209,927	19,104,964	19,104,964
2	KAMBITIN	41,471,830	20,735,915	20,735,915
3	RAMANIA	41,429,059	20,714,530	20,714,530
4	BENTOT	46,116,152	23,058,076	23,058,076
5	AMPARI BURA	32,069,566	16,034,783	16,034,783
6	KOTAM	58,661,026	29,330,513	29,330,513
7	BETANG NALONG	34,436,783	17,218,391	17,218,391
8	MAWANI	45,318,814	22,659,407	22,659,407
9	JANGO	38,203,221	19,101,610	19,101,610
10	LALAP	40,434,464	20,217,232	20,217,232
	Total	416,350,841	208,175,421	208,175,421
IV	KECAMATAN AWANG			
1	JANAH JARI	40,527,173	20,263,586	20,263,586
2	BANGKIRAYEN	51,532,357	25,766,178	25,766,178
3	HAYAPING	39,224,718	19,612,359	19,612,359
4	TANGKAN	43,121,852	21,560,926	21,560,926
5	WUNGKUR NANAKAN	41,638,133	20,819,067	20,819,067
6	AMPARI	41,126,157	20,563,078	20,563,078
7	APAR BATU	49,700,706	24,850,353	24,850,353
8	BIWAN	37,358,709	18,679,355	18,679,355
9	JANAH MANSIWUI	33,427,963	16,713,981	16,713,981
10	DANAU	34,105,955	17,052,977	17,052,977
11	PIANGGU	46,141,722	23,070,861	23,070,861
	Total	457,905,443	228,952,722	228,952,722
V	KECAMATAN DUSUN TENGAH			
1	SAING	59,482,415	29,741,207	29,741,207
2	RODOK	75,720,132	37,860,066	37,860,066
3	AMPAH II	31,050,314	15,525,157	15,525,157
4	PUTAI	39,438,465	19,719,232	19,719,232
5	NETAMPIN	52,077,783	26,038,891	26,038,891
6	SUMBER GARUNGGUNG	45,453,861	22,726,930	22,726,930
7	MUARA AWANG	34,509,104	17,254,552	17,254,552
	Total	337,732,072	168,866,036	168,866,036

PARAF

KABAG HUKUM	KOPAL A OPD	ASS.	SEKDA
f	FC	f	f

No	Nama Desa	Total DBHPRD Per Desa	Pembagian Per Tahapan	
			Tahap I	Tahap II
VI	PEMATANG KARAU			
1	MUARA PLANTAU	39.981.684	19.990.842	19.990.842
2	KETAB	34.576.680	17.288.340	17.288.340
3	KUPANG BERSIH	35.164.386	17.582.193	17.582.193
4	TUYAU	35.969.584	17.984.792	17.984.792
5	PINANG TUNGGAL	39.623.127	19.811.564	19.811.564
6	NAGALEAH	47.219.652	23.609.826	23.609.826
7	LAMPEONG	42.697.618	21.348.809	21.348.809
8	BARARAWA	41.080.973	20.540.486	20.540.486
9	BAMBULUNG	97.254.463	48.627.231	48.627.231
10	LEBO	31.568.333	15.784.167	15.784.167
11	MURU DUYUNG	38.085.822	19.042.911	19.042.911
12	TUMPUNG ULUNG	40.504.069	20.252.034	20.252.034
13	SUMBER REJO	97.325.688	48.662.844	48.662.844
	Total	621.052.078	310.526.039	310.526.039
VI	KECAMATAN PAJU EPAT			
1	JURU BANU	30.507.609	15.253.804	15.253.804
2	TELANG BARU	115.911.388	57.955.694	57.955.694
3	TAMPU LANGIT	39.047.781	19.523.890	19.523.890
4	TELANG	42.854.845	21.427.423	21.427.423
5	MAIPE	37.208.904	18.604.452	18.604.452
6	MURUTUWU	49.799.400	24.899.700	24.899.700
7	BALAWA	51.631.777	25.815.888	25.815.888
8	KALINAPU	30.449.921	15.224.961	15.224.961
9	SIONG	91.796.040	45.898.020	45.898.020
	Total	489.207.664	244.603.832	244.603.832
VIII	KECAMATAN RAREN BATUAH			
1	PURI	36.479.239	18.239.619	18.239.619
2	LENGGANG	47.550.951	23.775.476	23.775.476
3	BATUAH	48.669.907	24.334.953	24.334.953
4	UNSUM	38.096.158	19.048.079	19.048.079
5	BARUYAN	44.019.686	22.009.843	22.009.843
6	TURAN AMIS	48.272.531	24.136.265	24.136.265
7	MALINTUT	33.375.284	16.687.642	16.687.642
8	TANGKUM	65.209.416	32.604.708	32.604.708
9	SIBUNG	50.973.374	25.486.687	25.486.687
	Total	412.646.546	206.323.273	206.323.273
IX	KECAMATAN PAKU			
1	TAMPA	61.265.969	30.632.984	30.632.984
2	KALAMUS	50.086.707	25.043.354	25.043.354
3	SIMPANG BANGKUANG	67.555.000	33.777.500	33.777.500
4	PATUNG	65.947.316	32.973.658	32.973.658
5	RUNGGU RAYA	90.223.728	45.111.864	45.111.864
6	BANTAI NAPU	44.206.608	22.103.304	22.103.304
7	TARINSING	33.519.090	16.759.545	16.759.545
8	PAKU BETO	34.081.029	17.040.514	17.040.514
9	GANDRUNG	35.386.373	17.693.186	17.693.186
10	PANGKAN	32.229.812	16.114.906	16.114.906
11	KUPANG BARU	33.422.607	16.711.304	16.711.304
12	LUAU JAWUK	64.952.610	32.476.305	32.476.305
	Total	612.876.850	306.438.425	306.438.425
X	KECAMATAN KARUSEN JANANG			
1	DAYU	56.306.663	28.153.332	28.153.332
2	WURAN	45.112.552	22.556.276	22.556.276
3	IPU MEA	52.234.299	26.117.149	26.117.149
4	LAGAN	57.010.922	28.505.461	28.505.461
5	PUTUT TAWULUH	33.897.270	16.948.635	16.948.635
6	SIMPANG NANENG	49.197.440	24.598.720	24.598.720
7	KANDRIS	38.753.613	19.376.806	19.376.806
	Total	332.512.759	166.256.379	166.256.379
	Jumlah Keseluruhan	5.074.986.644	2.537.493.322	2.537.493.322

Pj. Bupati Barito Timur


Indra Gunawan

